



UKI PRESS  
Jl. Mayjen Sutoyo no. 2 Cawang 13630



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS



**SEMINAR NASIONAL &  
CALL FOR PAPERS**  
REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS  
KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA

PUSAT STUDI LINTAS AGAMA DAN BUDAYA UKI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKI  
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UKI.

Jakarta, 22 November 2018  
Auditorium Griha William Soeryadjaya  
Gedung FK UKI, Cawang, Jakarta

# PROSIDING

## “REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA”

### Susunan Panitia

#### Penasehat

: Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA  
*(Rektor UKI)*  
Pdt. Wellem Sairwona, M,Th

#### SC

: Prof. Dr. Charles Marpaung  
Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA  
*Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA)*  
Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.  
*Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (WRKSA)*  
Dr.rer.pol., Ied Veda R. Sitepu, SS., MA.  
*Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama (WRKK)*

#### Penanggungjawab

: Dr. Wahyu Astjarjo Rini, M.A, M.Pd. K  
*Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya*

#### Ketua

: Pdt. Ester Rela Intarti, M.Th

#### Sekretaris

: Pdt. Indri Jatmoko, S.Si (Teol)., M.M.

#### Sekretariat

: Decmoon Destine, S.Pd

#### Bendahara

: Ir. Edison Siregar, M.M  
Elferida Sormin , S.Si., M.Pd

#### Koor Acara

: Pdt. Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th  
Pdt. Indri Jatmiko, S.Th., M.M

#### Koor Prosiding

: Dr. Lamhot Naibaho, M.Pd.  
Dr. Demsi Jura, M.Th.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.

#### Koor Perlengkapan

: Hotma Parulian Panggabean, SE., M.Ak.

#### Koor Keamanan

: Dandy Sendayu Noron, S.Sos

Koor Pubdekdok : Dr. A. Dan Kia, M.Th  
Jehezkiel Sandi Juli Handoko, A.Md.

Koor Konsumsi : Ledyana Efarida, A.Md.,  
Rotua Vicky Ria, SE

Reviewer : Dr. Demsy Jura, M.Th.  
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.  
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.  
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor : Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Demsy Jura, M.Th.

# **PROSIDING**

**“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN  
BERDASARKAN PANCASILA”**

## **Reviewer:**

Dr. Demsey Jura, M.Th.  
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.  
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.  
Dr. Desi Sianipar, M.Th.  
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

## **Editor:**

Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.  
Dr. Demsey Jura, M.Th.

**ISBN: 978-979-8148-96-5**

Penerbit  
UKI Press  
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630  
Telp.(021)8092425, [ukipress@uki.ac.id](mailto:ukipress@uki.ac.id)  
Cetakan 1, 2018

**UKI Prees  
2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang penuh berkat dan rahmat atas perkenanNya serta dukungan dari pimpinan Universitas Kristen Indonesia Seminar Nasional dan call for paper dengan tema *Revitalisasi Indonesia melalui identitas Kemajemukan berdasarkan Pancasila* yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2018 dapat terlasana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan.

Tema dalam seminar nasional ini dipilih dengan alasan, pertama sebagai wujud kontribusi Universitas Kristen Indonesia yang telah berusia 65 sejak berdiri pada 15 Oktober 1953 dengan turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Panggilan tersebut bertugas membentuk calon pemimpin yang cakap dan profesional, beriman dan berwawasan Oikumenis, serta berkarakter dan bervisi pelayanan bagi kemanusiaan dengan membawa serta, damai dan sejahtera, peka dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan wawasan kebangsaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan yang kedua, untuk menghimpun berbagai pemikiran dan wawasan serta pengalaman dari para pembicara dalam rangka membangun jati diri terhadap identitas kemajemukan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seminar nasional ini dihadiri oleh Bp. Lukman Hakim, Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai keynote speaker, dan Bp. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama serta para akademisi pemakalah dari berbagai kampus atau universitas, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, pembicara utama, Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, pemakalah/nara sumber, moderator, peserta, panitia, para alumni, para mahasiswa serta seluruh stake holder yang telah berupaya mensukseskan seminar nasional ini.

Jakarta, 18 Maret 2019

Ketua LPPM UKI

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
<b>Keynote Speakers</b>		
1	Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan. Ahmad Basarah (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) MPR RI.	1
2	Revitalisasi Indonesia melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia)	11
<b>Speakers</b>		
3	Membumikan Pancasila: Aktualisasi Nilai dan Pembudayaan Karakter. Benny Susetyo Pr. (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP)	16
4	Membangun Budaya Toleransi Berbasis Wawasan Kebangsaan Guna Memperkuat Kedaulatan Indonesia. Prof. Dr. Muhammad AS. Hikam, APU. (Dosen Universitas Presiden)	22
5	Generasi Muda dan Identitas Kemajemukan Indonesia di Kancah Internasional. Biondi Sima, M.Sc, LL.M & Zeva Sudana, M.A (Co-chairs Indonesian Youth Diplomacy (IYD))	35
6	Mengelaborasi peran strategis Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya dalam menyemai identitas kemajemukan Indonesia. Wahyu A. Rini (Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Universitas Kristen Indonesia).	49
<b>Pemakalah</b>		
7	Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan dalam Penguatan Karakter Bangsa. Aartje Tehupeiory (Universitas Kristen Indonesia)	59
8	Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia. George Royke Deksin (Akademi Militer Magelang)	68

9	Meneguhkan Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila sebagai Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mukhtadi (Universitas Pertahanan).	82
10	Gaya Kepemimpinan yang Berintegritas Pancasila. Petrus Danan Widharsana, S. Pantja Djati (Universitas Mercu Buana Jakarta), St. Hendro Budiyanto, M. M	94
11	Membangun Budaya Toleransi melalui Dunia Nyata. Mariani Harmadi (STT Baptis Semarang)	102
12	Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi <i>Hate Speech</i> di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019. Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si (Universitas kristen Indonesia)	115
13	Pendidikan sebagai Ujung Tombak Kerukunan Antar Umat Beragama. E. Handayani Tyas (Universitas Kristen Indonesia)	137
14	Revitalisasi Ekonomi Pancasila melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Potensi Lokal. Katiah (Prodi Pendidikan Tata Busana, FPTK, Universitas Pendidikan Indonesia), Supriyono (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia), Asep Dahliyana (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia)	147
15	Membangun Jejaring Lintas Budaya dan Agama untuk Menjaga Kemajemukan. Antie Solaiman (Universitas Kristen Indonesia)	160
16	Kebijakan Publik bila Mencantumkan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan sebagai Bentuk Revitalisasi Pancasila. Rospita Adelina Siregar (Universitas Kristen Indonesia)	173
17	Model Pendidikan yang Cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan Agama yang Inklusif dan Pendidikan Agama yang Multikultural. Fredik Melkias Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	178
18	Peranan Mahasiswa dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Kekristenan. Esther Relat Intarti (Universitas Kristen	191

	Indonesia)	
19	Etika Teologi Politik: Analisis Etis Teologis Ketaatan kepada Pemerintah. Noh Ibrahim Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	199
20	Peran Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia dalam Konstelasi Nasional Pembangunan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Dirk Roy Kolibu (Universitas Kristen Indonesia)	210
21	Pendidikan Multikultural untuk Anak melalui Belajar Injil Yohanes supaya Terbangun Semangat Penerimaan dalam Kehidupan Berbangsa. Yohanes Patar Parulian (Universitas Kristen Indonesia)	223
22	Pendekatan Tipologi Tripolar Alan Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia. Demsy Jura (Universitas Kristen Indonesia)	232
23	Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Radikalisme pada Anak. Merci Merliana Laik (Universitas Kristen Indonesia)	246
24	Hospitalitas sebagai Praksis Kristiani dalam Memberdayakan Disabilitas Korban Kekerasan. Alfonso Munte (Universitas Indonesia)	255

## **Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia**

**George Royke Deksino**

georgeroykedeksino@gmail.com

### **Abstrak**

*Perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun perjuangan untuk menjaga eksistensi negara-bangsa dalam mencapai tujuan nasional serta mempertahankan kemerdekaan yang hakiki sesuai cita-cita para pendiri negara - bangsa (the founding fathers), belumlah selesai dan masih terus diperjuangkan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pemahaman tentang Ketahanan Nasional secara berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis. Ketahanan Nasional dapat dipahami baik sebagai konsepsi maupun sebagai suatu kondisi. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Kemudian pemahaman Ketahanan Nasional sebagai suatu kondisi adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsung hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Melalui pemahaman tentang Ketahanan Nasional yang berkelanjutan dalam konteks kemajemukan bangsa Indonesia diharapkan setiap komponen bangsa memiliki wawasan kebangsaan yang utuh dan tanggung jawab yang tinggi untuk bersama sama menjaga dan melestarikan kebhinekaan tunggal ika sebagai identitas primer. Pembahasan ini menggunakan metode historis dan model Astagatra. Model yang berisi delapan gatra terdiri atas trigatra (geografi, sumber daya alam, demografi) dan panca gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan). Hasil analisis adalah bahwa keberlangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa, sangat dipengaruhi oleh kemampuan bangsa tersebut dalam memahami dan menguasai kondisi Astagatra secara berkelanjutan. Kesimpulan pembahasan bahwa pemahaman tentang Astagatra secara utuh dan berkelanjutan merupakan ketahanan nasional yang dapat memberi kontribusi positif dalam meneguhkan kemajemukan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Implikasi pembahasan adalah bilamana ketahanan nasional diabaikan oleh masyarakat Indonesia maka dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup bangsa yang sangat majemuk.*

**Kata kunci:** ketahanan nasional, astagatra, kemajemukan

### **I. Pendahuluan**

Perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan

mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. seorang sejarawan menyatakan, "... dahulu, musuh itu jelas: penjajah yang tidak memberikan ruang untuk

*mendapatkan keadilan, kemanusiaan, yang sama bagi warga negara, pada masa kini, musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri seperti korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-menyuap, dan lain lain (Lubis: 2008).*

Dua dekade pasca reformasi, masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya dewasa dalam memaknai dan mempraktikkan demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan kaum reformis. Reduksi kewarganegaraan bagi kelompok minoritas keberagamaan dan etnik, diiringi dengan berbagai konflik SARA yang bersifat komunal masih terjadi. Tercatat ada tiga konflik SARA bersifat besar dan komunal pada pasca reformasi tahun 2000, konflik Ambon, Konflik Poso 2002, konflik Suku di Kalimantan (Sampit, Sambas, Ketapang, tahun 2004. Konflik Sampang tahun 2011-2012, Peristiwa Jember September 2013, Peristiwa Cikeusik Banten penyerangan kelompok Ahmadiyah tahun 2012 dan beberapa konflik antar desa dan kelompok ulayat di Sulawesi, NTT (Hikam, 2014).

Kemudian, Setara Institute menyatakan bahwa telah terjadi 155 kasus intoleransi di Indonesia di sepanjang tahun 2017. Pandangan dari Setara Institute mengenai intoleransi di Indonesia, juga dikemukakan oleh Panglima TNI pada saat *Fit and Proper Test* di hadapan anggota DPR RI tahun 2017. Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI saat itu, menyatakan bahwa ancaman konflik

komunal berbasis SARA masih ada. Panglima TNI menyatakan bahwa konflik komunal berbasis SARA dinilai berpotensi merongrong legitimasi pemerintahan. "Dengan konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras termasuk antargolongan akan selalu ada (Kompas, 2017). Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang sangat majemuk memiliki potensi ancaman SARA yang dapat berujung pada disintegrasi bangsa bilamana masyarakat Indonesia tidak memiliki ketahanan nasional yang utuh dan berkelanjutan.

Pemahaman tentang ketahanan nasional secara utuh dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Ketahanan nasional menjadi keniscayaan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan disegani. Terlebih pada saat ini dimana bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) baik legislatif maupun pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, maka setiap komponen bangsa perlu menyadari pentingnya ketahanan nasional yang berkelanjutan.

## **II. Tinjauan Pustaka**

Setiap bangsa yang merdeka tentunya memiliki tujuan dan cita cita nasional. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memiliki tujuan dan cita cita nasional sebagaimana dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 pada aline 4 yang menyatakan “ *Kemudian dari pada*

itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional ini tentunya tidak mudah, terlebih dihadapkan pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Perwujudan tujuan dan cita-cita nasional memerlukan komitmen dan kesadaran yang tinggi dari setiap komponen bangsa.

Bagaimana untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana yang diharapkan dari para pahlawan dan pendiri bangsa? Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab serta sejahtera merupakan pekerjaan rumah setiap komponen bangsa. Proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara-bangsa dalam mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara - bangsa (*founding fathers*) perlu terus diperjuangkan. Melalui

penguatan ketahanan nasional yang berkelanjutan dan dipahami oleh masyarakat luas dari generasi ke generasi, maka impian dan cita-cita untuk menjadi bangsa yang besar dan disegani yang berdasarkan Pancasila akan dapat diwujudkan.

Ketahanan Nasional dapat dipahami dari dua sisi yaitu pertama sebagai suatu konsep dan kedua sebagai suatu kondisi. Ketahanan nasional sebagai konsep merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Kemudian pemahaman ketahanan nasional sebagai suatu kondisi adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional (Lemhannas, 2018). Ketahanan nasional merupakan kesatuan yang terdiri dari delapan unsur yang disebut ASTAGATRA yaitu: gatra geografi, gatra sumber kekayaan alam (SKA), gatra demografi, gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya dan gatra pertahanan keamanan.

Gagasan tentang ketahanan nasional sesungguhnya telah tercetus sejak awal tahun enam puluhan di sekolah staf dan komando Angkatan Darat (SSKAD) Bandung. Pada saat ini SSKAD telah berubah namanya menjadi Seskoad (Sunardi, 2004). Konsepsi analitis tentang Ketahanan nasional lahir pada tahun 1972 yang

merumuskan bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamik satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional didalam mengatasi dan menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan untuk mengejar tujuan nasional. Disini terlihat dengan jelas adanya unsur perlunya dimiliki kualitas untuk “*survive*” yang disublimasikan kedalam keuletan serta kualitas kemampuan berkembang “*growth*” agar memenuhi tuntutan peningkatan kehidupan nasional yang disublimasikan kedalam ketangguhan.

Memahami ketahanan nasional tentunya tidak dapat dilepaskan dari geostrategi Indonesia. Geostrategi pada dasarnya merupakan ketahanan nasional, sebagai suatu cara untuk tetap mempertahankan wilayah NKRI (Lemhanas, 2017). Geostrategi dipahami sebagai suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional (Jakni, 2014). Geostrategi diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Geostrategi memiliki fungsi daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap identitas,

integritas, dan eksistensi bangsa dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Melalui geostrategi bangsa Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana menyusun strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang jauh lebih baik, memiliki keadilan sosial dan kemakmuran ditengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

### III. Pembahasan

#### 1. Pendekatan Astagatra

Ketahanan nasional merupakan kesatuan yang terdiri dari delapan unsur yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kedelapan unsur disebut Astagatra terdiri dari Geografi, Sumber Kekayaan Alam (SKA) dan Demografi disebut juga Tri Gatra dan Panca Gatra yang terdiri dari unsur Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan. Kedelapan gatra ini merupakan hal penting dalam membangun dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Adapun penjelasan Tri Gatra dan Panca Gatra sebagai berikut:

#### 2. Gatra Geografi

Negara Indonesia terletak pada lokasi kepulauan atau berbatasan dengan banyak laut (*multi-sea and insular*). Negara Indonesia berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tanggal 10 Desember 1982 telah disahkan dan termasuk dalam kategori negara kepulauan (*Archipelagic State*) dan Indonesia juga telah meratifikasinya dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985

(Lemhanas, 2017). Kondisi ini berbeda dengan negara seperti Iran dan Pakistan yang berbatasan hanya satu lautan saja (*one-sea location*) atau negara Turki dan Italia yang berbatasan dengan dua lautan (*two-sea location*). Kemudian lokasi negara Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga. Fakta geografis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bentuk wilayah terdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil, kondisi ini semakin mempertegas bahwa Indonesia dipersatukan oleh laut. Negara Indonesia memiliki luas daratan 2.027.087 Km<sup>2</sup> dan perairan 5.866.163Km<sup>2</sup>, termasuk luas Laut ZEE 2.700.000 Km (Lemhanas, 2017). Indonesia memiliki  $\frac{3}{4}$  wilayah laut yang terbentang secara horisontal dari sabang di sebelah barat sampai Merauke di sebelah Timur sepanjang lebih dari 5.140 Kilometer dan dari pulau Miangas di sebelah Utara sampai pulau Dana di sebelah Selatan sepanjang lebih dari 1.949 kilometer. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas (5,8 juta Km<sup>2</sup>) dengan ditaburi pulau-pulau besar dan kecil (17.504 pulau, ada 13.466 pulau sudah memiliki dokumen hasil survei toponimi). Kondisi Geografi bangsa Indonesia yang sangat luas dan menyimpan potensi kekayaan di daratan, lautan dan udara yang sangat beraneka ragam, merupakan aset yang bernilai tinggi untuk dapat dimanfaatkan dan menumbuhkan cinta tanah air dan patriotisme bagi setiap komponen bangsa.

### **3. Gatra Sumber Kekayaan Alam**

Istilah kekayaan alam secara resmi diawali pemakaiannya pada UUD Negara RI tahun 1945 pasal 33

ayat (3) yang menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-undang lain yang menggunakan istilah Kekayaan Alam adalah Undang-undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 pada pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional” (Lemhanas, 2017). Berbicara mengenai sumber kekayaan alam Indonesia setidaknya terdapat tiga bidang yang saling terkait adalah energi, kehutanan, perikanan dan kelautan. Kekayaan alam Indonesia di bidang energi, kehutanan, perikanan dan kelautan merupakan modal besar bagi Indonesia untuk menjadi negara besar. Presiden RI pertama Ir. Soekarno pernah menyatakan: *Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya* (Hikam, 2014). Sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat besar ini dapat menjadi aset dan potensi kekuatan Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber Kekayaan Alam (SKA) harus dapat dikelola untuk mendatangkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke. Kedaulatan suatu bangsa akan sumber kekayaan alam juga diatur secara internasional dalam Resolusi Sidang Umum PBB 1803 pada tanggal 14

Desember 1962 yang menyebutkan: *“The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their national wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of the well-being of the people of the State concerned”* (Lemhanas, 2017)

Bangsa Indonesia yang memiliki sumber kekayaan alam yang sangat besar dan menguntungkan ini, tentunya menjadikan pihak-pihak diluar bangsa Indonesia berkeinginan untuk ingin memanfaatkan potensi sumber kekayaan alam bangsa Indonesia. Pengambilan sumber kekayaan alam Indonesia oleh bangsa asing tentu akan dilaksanakan melalui pelemahan integrasi nasional yang dilakukan dengan berbagai cara antara lain “menghembuskan” timbulnya rasa ketidakadilan pada setiap anak bangsa, melemahkan penegakkan hukum, eksploitasi sumber kekayaan alam yang berlebihan, memperbesar kesenjangan sosial, memperluas kemiskinan, melemahkan aspirasi masyarakat, memarjinalkan kelompok kelompok kecil sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan, diskriminasi, kemiskinan dan lain lain.

Mencermati sumber kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesian maka setiap komponen bangsa harus memiliki kesadaran yang tinggi dan wawasan kebangsaan yang luas mengenai sumber kekayaan alam Indonesia, agar aset yang sangat bernilai tinggi ini dipelihara, dan dijaga, serta dikelola untuk menjadi sumber kemakmuran rakyat Indonesia sekaligus menjadi sarana perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

#### 4. Gatra Demografi

United Nation (1958) dan *International Union for the Scientific Study of Population/IUSSP* (1982) mendefinisikan demografi sebagai studi ilmiah masalah kependudukan yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya (Lemhanas, 2018). Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2014 diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia berjumlah 254 juta jiwa. Ini merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak ke 4 di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% pertahun (Lemhanas, 2018). Kemudian bila memperhatikan perhitungan dari Bappenas memperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2018 akan berjumlah 267 juta (Bappenas, 2018). Dari sensus penduduk tersebut diketahui bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami Bonus Demografi dimana jumlah penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk yang tidak produktif (usia 0-14 dan diatas 64 tahun). Pada masa bonus demografi (tahun 2020 – 2030) merupakan jendela peluang (*windows opportunity*) yang dapat positif dan juga negatif. Bonus demografi yang positif bagi pembangunan nasional dapat diidentifikasi seperti : (1) terdapat suplai tenaga kerja yang besar sehingga meningkatkan pendapatan per kapita apabila mendapat kesempatan kerja yang produktif, (2)terdapat peningkatan peranan perempuan yang juga memasuki pasar kerja sehingga mampu membantu untuk meningkatkan pendapatan, (3) terdapat tabungan masyarakat yang

dapat diinvestasikan secara produktif, dan (4)terdapat modal manusia yang besar apabila ada investasi untuk itu (Giyarsih, 2015). Bonus demografi yang bernilai positif dapat dikelola oleh pemerintah untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan bangsa sekaligus memperat persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Bonus demografi yang bersifat negatif antara lain seperti tidak terserapnya tenaga kerja produktif, tentu dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial antar warga dan cenderung meningkatnya angka kriminalitas karena tingginya angka pengangguran. Oleh sebab itu pemerintah harus dapat mengelola bonus demografi ini menjadi kekuatan bangsa untuk memaksimalkan peluang positif dan meminimalisir dampak negatifnya.

### **5. Gatra Ideologi**

Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Bangsa Indonesia memiliki Ideologi Pancasila Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang ulet dan tangguh untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar ataupun dari dalam. Bangsa Indonesia tidak akan dapat menghindari dinamika globalisasi dengan pelbagai ancaman dan tantangan yang dihadapi.

Dalam suatu kesempatan kegiatan konferensi Nasional Umat Katolik Indonesia, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu

menyatakan: *“Diperlukan peran serta dari seluruh komponen bangsa untuk tetap memelihara sikap nasionalisme kesadaran bela negara dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945. Jika Pancasila tidak dijadikan falsafah dalam berbangsa dan bernegara, maka bangsa ini akan kehilangan roh dan jiwanya. Akibatnya, masyarakat dapat mudah disusupi oleh ideologi asing yang belum tentu sesuai dengan akar budaya bangsa Indonesia,”* Demikian pernyataan Menteri Pertahanan RI pada acara Konferensi Nasional Umat Katolik Indonesia bertajuk 'Revitalisasi Pancasila', di Universitas Katolik Atma Jaya, di Jakarta, (Media Indonesia, 2018).

Menyikapi perkembangan global yang sangat dinamis dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat maka pengaruh dari luar termasuk ideologi asing dan nilai nilai barat yang berdampak negatif tidak dapat terbendung. Oleh sebab itu diperlukan penanaman nilai nilai Pancasila dan implementasinya secara terencana dan berkelanjutan dari tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi serta di setiap instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan dan atau Pancasila perlu secara terus menerus ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan sejarah perjuangan bangsa dan kepramukaan. Hal ini penting agar ideologi Pancasila dapat terus dilestarikan pada segala lapisan komponen bangsa.

### **6. Gatra Politik**

Secara etimologis politik berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani) yang artinya negara kota. Orang yang mendiami polis disebut *polites* yang artinya warga negara. *Politikos* berarti kewarganegaraan. Politik merupakan kegiatan dan interaksi manusia yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum (Lemhanas, 2017).

Politik adalah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan kekuasaan atau kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan berhubungan erat dengan penyaluran aspirasi rakyat sebagai wujud dari kedaulatan di tangan rakyat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan politik diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis dengan memelihara stabilitas politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Segenap komponen bangsa dan para pejabat baik yang ada di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif harus dapat mengedepankan kepentingan nasional diatas kepentingan partai atau golongannya.

Implementasi pengelolaan pemerintahan negara serta pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sebagai kinerja politik harus dilaksanakan berdasarkan paradigma nasional, diantaranya konsep wawasan nusantara yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan nasional Indonesia. Berbagai kebijakan politik, berupa peraturan perundang-undangan di semua tingkatan, kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah harus mengacu

untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia di semua wilayah negara, bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Dengan kata lain, kehidupan sosial kemasyarakatan harus dilandasi oleh sikap dan perilaku yang didasari oleh solidaritas dan toleransi yang tinggi, serta menjauhkan diri dari rasa superioritas, chauvinitas dan diskriminasi berdasarkan suku, adat istiadat, ras dan agama.

### **7. Gatra Ekonomi**

Bidang ekonomi adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Ekonomi yang dibangun oleh pemerintah Indonesia adalah ekonomi berbasis pada konstitusi UUD 1945. Seorang tokoh bangsa sekaligus proklamator, bung Hatta memiliki pemikiran yang visioner dan komprehensif tentang ekonomi Indonesia. Pemikiran bung Hatta menurut banyak studi (Damanhuri, 1990; Mubyarto, 2001; Swasono, 2005) telah tertuang dalam pasal pasal ekonomi UUD 1945 terutama pasal 2 ( ayat 2), pasal 27 (ayat 2), pasal 33 ( ayat 1,2 dan 3) dan pasal 34. (ayat 1). Bila dirangkakan secara bebas sebagai berikut: "*Sistem Ekonomi Indonesia (SEI) disusun sebagai usaha bersama berdasar asas "kekeluargaan" dimana: (1) cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara, (2) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (3) Tiap tiap warganegara berhak atas pekerjaan*

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan (4) Fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan APBN dan APBD untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sistem Ekonomi Indonesia hendak membangun ekonomi rakyat yang mengedepankan kesejahteraan untuk semua rakyat Indonesia.

Saat ini Indonesia telah berada pada tahap ke tiga dari pelaksanaan RPJPN 2005 – 2025. Pembangunan ekonomi tahun 2015-2019 diarahkan untuk membangun landasan bagi Indonesia untuk keluar dari *middle income trap* untuk memasuki menjadi negara maju tahun 2030 (Lemhanas, 2018). Tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN diikuti dengan pergantian pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan visi dan misi pembangunan nasional 2015 – 2019, untuk Visi yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan pada gotong royong. Visi tersebut diterjemahkan dalam tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu berdaulat dalam politik berdirikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dan ada 7 Misi pembangunan tahun 2015 – 2019 yaitu (Lemhanas, 2018): a) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim; b) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, demokratis berlandaskan negara hukum; c) Mewujudkan politik luar negeri bebas

aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; d) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; e) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; f) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; g) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kemudian ada sembilan prioritas (NawaCita) untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah: a) Negara memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; b) Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; c) Membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan; d) Reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; e) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia; f) Peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; g) Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; h) Revolusi karakter bangsa; dan i) Memperteguh ke Bhinnekaan dan memperkuat restorasi.

Dari sembilan prioritas pembangunan di atas ada tiga kegiatan penting yang berkaitan dengan dengan strategi pembangunan ekonomi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan, kedua Peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar Internasional dan ketiga kemandirian

Ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomis domestik. Mencermati tiga kegiatan penting di bidang ekonomi yang disusun oleh pemerintah RI sangat jelas sekali bahwa pemerintah memberikan penekanan penting mengenai pemerataan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan waduk yang berjumlah 49 proyek baru dan 16 proyek lama (Detik.com, 2018). Pembangunan nasional secara merata di seluruh wilayah NKRI dapat meminimalisir kesenjangan sosial antar daerah atau provinsi khususnya yang berada di P Jawa maupun di luar P. Jawa.

### **8. Gatra Sosial budaya**

Masyarakat Indonesia sebagai sebuah identitas nasional dengan kebudayaan yang beragam dan mendiami Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah mata rantai sosial dalam menjaga saling keterkaitan, kesatuan dan kebersamaan. Rasa kebersamaan sebagai sebuah bangsa berawal dari kesadaran diri dan kelompok akan adanya tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang memiliki ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI 1945. Dari sisi budaya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa hanya dapat dipadukan menjadi sebuah nilai kebangsaan kalau dikembangkan dalam sebuah kerangka budaya nasional (Lemhanas, 2018). Gatra sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial dimana manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan sesamanya, dan segi budaya yang

merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah dan hasil laku yang terlembagakan. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai keberibadian nasional berdasarkan Pancasila

Masyarakat Indonesia mempunyai budaya lokal dan budaya nasional yang terkonstruksi melalui proses sejarah yang sangat panjang. Perjuangan bersama membangun nilai-nilai kebangsaan itu menjadi modal utama terbangunnya ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal. Keaneka-ragaman budaya dan adat istiadat menjadi aset bagi bangsa Indonesia untuk dapat digali dan diperkenalkan bagi masyarakat dunia sehingga mampu membangun rasa kebanggaan dan nasionalisme yang tinggi sebagai identitas bangsa. Pengenalan dan pembelajaran berbagai aset budaya baik di bidang seni tari, musik, grafis, pahat, dan lain-lain, dari anak-anak di tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi sangat perlu diberikan untuk menanamkan dan membangun rasa cinta tanah air.

Kemudian dalam kehidupan sosial, dan bernegara, masyarakat Indonesia memiliki landasan konseptual yaitu wawasan nusantara. Wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dibentuk dari dua dimensi pemikiran yaitu pemikiran realitas atau kewilayahan dan dimensi pemikiran pemanfaatan. Wawasan nusantara adalah perspektif bagi bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah dan segala

potensi serta kekayaan yang terkandung didalamnya untuk membangun kesejahteraan dan keamanan rakyat Indonesia.

### **9. Gatra Pertahanan keamanan**

Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 30 ayat (2) dinyatakan secara tegas bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (Lemhanas, 2018). Pertahanan dan keamanan merupakan suatu tuntutan perkembangan global yang harus disiapkan secara terencana, sistemik, menyeluruh dan sinergis. Pertahanan dan keamanan negara atau nasional merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Haneg, dan UU RI no 34 tahun 2004 Tentang TNI, yang harus diimplementasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan bagi kepentingan nasional.

Ketahanan nasional adalah merupakan salah satu doktrin nasional yang secara terus menerus dikembangkan, mengingat pentingnya ketahanan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di dalam upaya mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada ancaman, gangguan dan hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa. Untuk itu diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan

kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi ketahanan nasional.

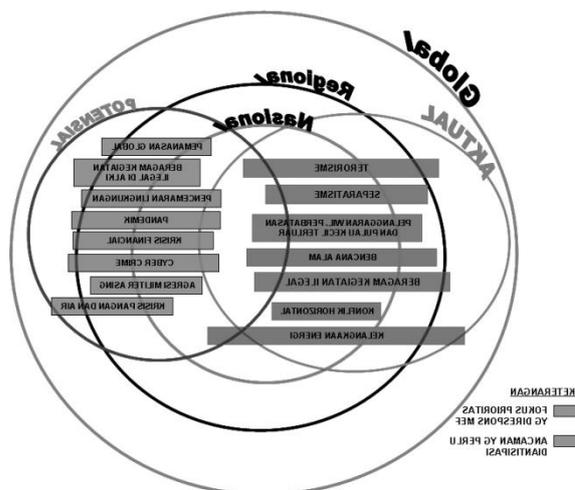
Kondisi pertahanan keamanan suatu bangsa merupakan garda terdepan dalam melindungi kedaulatannya, menjaga dan menciptakan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang RI nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam membangun garda pertahanan atau militer yang kuat maka Indonesia belum dapat seperti negara negara yang sudah makmur dan kuat secara ekonominya. Pada pembangunan kekuatan pertahanan atau militer negara Indonesia menerapkan kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum.

Kebijakan ini lahir berangkat dari suatu pemikiran bahwa untuk mendukung kepentingan nasional suatu negara harus dilindungi dengan kekuatan pertahanan yang tangguh dan handal. Meskipun bangsa dan negara Indonesia memiliki berbagai keterbatasan dan kendala dibidang anggaran namun kepentingan nasional bangsa Indonesia harus mendapat perlindungan dari kekuatan pertahanan yang tangguh dan handal. Kekuatan pokok minimum bukanlah merupakan kekuatan ideal tetapi suatu bentuk kekuatan minimal yang disiapkan selaras dengan sumber daya yang terbatas, namun diharapkan tetap dapat mengatasi ancaman aktual.

Secara visual, pemetaan kelompok ancaman menjadi ancaman aktual dan ancaman potensial sebagaimana gambar di halaman berikut (Kemhan, 2009). Gambar tersebut mengidentifikasi delapan

ancaman keamanan bersifat aktual (berwarna merah), yaitu : 1) terorisme, 2) separatisme, 3) pelanggaran wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, 4) bencana alam, 5) berbagai ragam kegiatan ilegal, 6) konflik horisontal, dan 7) kelangkaan energi. Sedangkan ancaman keamanan bersifat potensial meliputi: 1) pemanasan global, 2) berbagai ragam pelanggaran di ALKI, 3) pencemaran lingkungan, 4) pandemik, 5) krisis finansial, 6) *cyber crime*, 7) agresi militer asing, dan 8) krisis pangan dan air.

Secara geografis tujuh ancaman aktual terjadi di dalam negeri (nasional), namun mempunyai keterkaitan pada lingkup regional, bahkan global. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok ancaman yang bersifat potensial, yakni lingkup kejadiannya tidak hanya terbatas pada lingkup nasional. Kekuatan Pokok Minimum merupakan prasyarat bagi keberlangsungan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dari segala bentuk ancaman



**Gambar 1.**  
**Pemetaan Banglingstra dan Hakekat Ancaman**

## VI. Kesimpulan

Ketahanan nasional adalah merupakan salah satu doktrin nasional yang secara terus menerus perlu diberikan kepada setiap komponen bangsa. Hal ini penting karena melalui pemahaman ketahanan nasional secara utuh dan berkelanjutan secara khusus kepada generasi muda insan cendikia akan dapat membuka cakrawala berpikir dan wawasan mengenai kebangsaan, sehingga sebagai generasi bangsa akan mampu meningkatkan keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional atau geostrategi bangsa mencakup delapan unsur yang disebut Astagatra yang saling terintegrasi. Delapan unsur atau Astagatra merupakan pendekatan secara sistemik dalam memetakan berbagai persoalan bangsa dan menjawabnya secara komprehensif.

Keberlangsungan hidup dan eksistensi suatu bangsa, sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap komponen bangsa Indonesia dalam memahami dan menguasai kondisi Astagatra secara utuh dan berkelanjutan. Ketahanan nasional dapat memberi kontribusi positif dalam meneguhkan kemajemukan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Implikasi pembahasan adalah bilamana ketahanan nasional diabaikan oleh masyarakat Indonesia maka dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup bangsa yang sangat majemuk.

Oleh sebab itu adanya pemahaman tentang ketahanan

nasional secara utuh dan berkelanjutan, diharapkan dapat meminimalisir berbagai persoalan bangsa Indonesia, sehingga bangsa dan negara terhindar dari disintegrasi serta dapat terus melanjutkan pembangunan nasional dalam konteks kemajemukan bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita nasional. Tugas untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional tentunya tidak mudah, dan membutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi dari setiap anak bangsa untuk mau menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau individu.

#### Daftar Pustaka

- Darmadi, Hamid, (2008)., *Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.*, Bandung: Alfabeta.
- Giyarsih (2018), *Seminar Nasional : “Membentuk Karakter Generasi Muda yang Unggul Guna Mendukung Pertahanan Negara : Perspektif Kependudukan”* di Akademi Militer tanggal 15 September 2018. Magelang.
- Hikam, M. A. S. (2014). *Menyongsong 2014 – 2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah.* Jakarta: CV Rumah Buku.
- Indrawan, J., (2016), *Studi Strategis Dan Keamanan.*, Depok: Nadi Pustaka.
- Jakni, ( 2014), Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi ( hal.274) , Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Pertahanan, (2009) *Strategic defence Review* (SDR). Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Lemhannas RI (2017), Materi Pokok Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam, (hal.23) Jakarta: Lemhannas RI
- Lemhannas RI (2018), Materi Pokok Bidang Studi Sosial Budaya, penerbit: Lembaga Ketahanan Nasional RI Jakarta, Hal 65.
- Praditya ,Y., (2016)., *Keamanan di Indonesia*, Depok : Nadi Pustaka.
- Subandi (2003)., *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunardi, R.M (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (hal.14.) Jakarta: PT Kuaternita Adidarma.

#### Sumber Internet

- Bappenas. (2018). Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa-diunduh-tanggal-15-november-2018>
- Damanhuri,. (2016), *Ekonomi Berbasis konstitusi dan perlunya Haluan Pembangunan Model GBHN* dalam <http://mediaindonesia.com/read/detail/47287-ekonomi-berbasis-konstitusi-dan-perlunya-haluan-pembangunan-model-gbhn>
- Detik.com. (2018). Diakses dari <https://finance.detik.com/infstruktur/d-4130168/jokowi-bangun-65-bendungan-petani->

- panen-bisa-2-kali-setahun 16  
November 2018
- Kompas. (2017). Diakses dari  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/13352591/hadi-tjahjanto-anggap-konflik-berbasis-sara-bisa-berujung-pemberontakan> diunduh 15 Nov 2018.
- Lubis, N. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan. Diakses dari [http://www.polsri.ac.id/belmawa/Buku\\_Pedoman\\_Mata\\_Kuliah\\_Wajib\\_2016/9.%20.pdf](http://www.polsri.ac.id/belmawa/Buku_Pedoman_Mata_Kuliah_Wajib_2016/9.%20.pdf)
- Media Indonesia. (2018). Diakses dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/117329-indonesia-tidak-boleh-runtuh-oleh-pengaruh-ideologi-asing>, Sabtu, 17 November 2018.
- Setara Institute. (2017). Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/setara-institute-terjadi-155-kasus-intoleransi-sepanjang-2017.html> diunduh 15 Nov 2018.
- Tyas, E. H., & Naibaho, L. (2018). Kepemimpinan: Gaya Dan Peranannya Dalam Melaksanakan Revolusi Mental.